

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan Manusia, hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh *United Nation Development Programme*(1990) dalam teori Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Nur Baeti, 2013).

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan,

pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Marisca dan Haryadi, 2016). Dalam proses mencapai tujuan pembangunan, ada empat komponen yang harus diperhatikan dalam pembangunan manusia (UNDP, 1995). Empat komponen tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Produktivitas

Manusia harus berupaya meningkatkan produktivitas serta berpartisipasi secara penuh dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai bagian dari pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sosial politik. Segala hambatan yang dapat mencegah untuk memperoleh akses tersebut harus dihilangkan, karena semua orang harus dapat peluang berpartisipasi dalam mengambil manfaat yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap kesempatan atau peluang yang tersedia harus dipastikan tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga disiapkan untuk generasi mendatang. Segala sumber daya harus senantiasa dapat diperbarui.

4. Pemberdayaan

Semua orang diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh dalam menentukan arah kehidupan mereka. Sama halnya dalam memanfaatkan proses pembangunan maka harus berpartisipasi dalam mengambil keputusan.

Konsep pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat komponen diatas. Terdapat beberapa konsep pembangunan sumber daya yang dalam konteks makro merupakan keseluruhan dari proses aktivitas peningkatan kemampuan manusia yang didalamnya mencakup berbagai aktivitas, yaitu: penguatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan gizi, kesempatan kerja, lingkungan hidup yang sehat, penguatan ditempat kerja, serta kehidupan politik yang bebas (UNDP, 2001 dalam Sulaiman, 2012).

Pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia harus selalu diupayakan oleh pemerintah guna mempersiapkan generasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana permasalahan yang paling mendasar dalam pembangunan ini berada dalam peningkatan kemampuan dasar masyarakat baik secara fisik maupun non fisik (mental dan spiritual). Dalam hal ini pembangunan manusia menitikberatkan peningkatan kualitas hidup yang dilihat dari tiga aspek, yaitu: aspek kesehatan, yang diukur berdasarkan besar-kecilnya angka harapan hidup saat lahir, aspek pendidikan yang diukur berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan aspek daya beli yang diukur berdasarkan nilai pengeluaran per kapita.

Berdasarkan kecenderungan yang lebih besar terhadap kebutuhan dasar dari konsep pembangunan sumber daya manusia, maka perlu penanganan

yang intensif oleh pemerintah dalam pengelolaannya. Dilihat dari keterkaitan ketiga aspek tersebut terhadap aspek lainnya, menunjukkan bahwa taraf baik dalam penanganan ketiga aspek tersebut, secara signifikan memberikan taraf baik terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Artinya, dengan menfokuskan pembangunan sumber daya manusia dalam aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat, mampu memberikan dampak positif terhadap aspek lainnya.

Peranan pembentukan modal manusia sering dikaitkan dengan investasi membangun bangsa. Proses menyiapkan sumber daya yang berkualitas, mempunyai keahlian, produktif dan inovatif sangat penting bagi suatu negara dalam meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan tersebut dilihat dari seberapa besar keberhasilan pembangunan dalam pemerintahan, perekonomian hingga ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.1.1.1 Komponen Pembangunan Manusia

Lembaga UNDP (*United Nations Development Program*) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia yang disebut HDI (*Human Development Indeks*) dalam bentuk kuantitatif. HDI merupakan tolak ukur yang dirumuskan secara konstan dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga gambaran pembangunan tidak akan ditangkap secara sempurna. Terdapat tiga Indikator yang digunakan untuk mengukur HDI, yaitu (UNDP, *Human Development Report*, 1993) :

1. Indeks Harapan Hidup (*longevity*)

Pengukuran dengan indikator penghitungan harapan hidup saat lahir (*life expectancy of birth*) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (*infant mortality rate*).

2. Indeks pendidikan (*educational achievement*)

Pengukuran dengan dua indikator, yaitu angka melek huruf pada usia 15 tahun keatas (*adult literacy rate*) dan angka banyaknya penduduk tahun rata-rata usia 25 tahun keatas yang masih bersekolah (*the mean years of schooling*).

3. Indeks hidup layak (*access to resource*)

Pengukuran dengan menggunakan angka pengeluaran riil perkapita.

Sejak tahun 2014 di Indonesia mengalami perubahan dalam perhitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), namun secara umum metode perhitungan pembangunan manusia sama dengan yang digunakan UNDP, yaitu. (BPS, Indeks Pembangunan Manusia, 2014).

1. Indeks Kesehatan

Angka harapan hidup saat lahir dapat diketahui melalui rata-rata angka kelahiran dan kematian per tahun, perbandingan variabel tersebut diharapkan dapat mencerminkan rata-rata lama hidup yang diharapkan masyarakat dalam suatu wilayah. Besarnya nilai maksimum dan minimum untuk menghitung kesehatan telah disepakati oleh semua negara. Batas angka tertinggi menghitung komponen ini adalah 85 tahun dan terendah pada angka 20 tahun. Angka ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan UNDP.

2. Indeks Pendidikan

Perhitungan indeks ini berdasarkan dua indikator yaitu, Harapan Lama Sekolah (*Expected years of schooling*) dan Rata- Rata Lama Sekolah (*Mean Years Schooling*). Angka Harapan Lama Sekolah di artikan sebagai harapan yang dapat di tempuh oleh anak.

Angka harapan lama sekolah di hitung pada anak yang usia 7 tahun keatas. Langkah perhitungan RLS dengan menghitung banyaknyapenduduk yang menurut umur 7 tahun keatas, kemudian menghitung banyaknya penduduk yang masih sekolah menurut umur 7 tahun keatas. Setelah itu, menghitung rasio penduduk masih sekolah menurut umur 7 tahun keatas dan menghitung harapan lama sekolah. Dengan menjumlahkan formula sebagai berikut :

$$EYS_a^t = \sum_{i=a}^n \times \frac{E_i^t}{p_i^t}$$

Di mana :

EYS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang ber sekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : Usia ($a, a+1, \dots, n$)

Sedangkan untuk penghitungan Rata-Rata Lama Sekolah menggunakan cara penyeleksian penduduk usia 25 tahun keatas dan mengelompokkan jenjang pendidikan yang sedang di tempuh atau telah ditempuh. Dalam menghitung angka nilai pendidikan, terdapat batasan yang

telah di sepakati oleh beberapa negara. Batas maksimum untuk untuk Angka Harapan Lama Sekolah adalah 18 tahun dengan batas minimum 0 tahun. Sementara untuk Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun untuk batas maksimum dan 0 tahun untuk batas minimum.

Setelah mendapatkan nilai dari Angka Harapan Lama Sekolah dengan Rata-Rata Lama Sekolah, maka Pendidikan dihitung menggunakan rumus berikut:

$$I_{pendidikan} = \frac{RLS + HLS}{2}$$

Dengan dua indikator ini diharapkan dapat mencerminkan tingkat kemampuan pengetahuan yang ada di setiap wilayah.

3. Indeks Daya Beli

Pengukuran daya beli masyarakat kabupaten/kota, menggunakan rata-rata konsumsi yang dianggap paling dominan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang telah di standarkan agar dapat digunakan sebagai perbandingan antar daerah dan waktu sesuai indeks daya beli (*Purchasing Power Parity – PPP*). Terdapat 96 komoditi yang dipilih, terdiri dari 66 komoditi adalah jenis makanan sedangkan 30 komoditi lainnya adalah jenis non makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli (PPP) menggunakan metode Rao. Untuk menghitung rata-rata pengeluaran per kapita riil yang telah disesuaikan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (Analisis Pembangunan Manusia, 2016).

1. Menghitung rupiah yang dikeluarkan(*value*) dan jumlah barang yang dikonsumsi(*quantity*) 96 komoditas PPP dari data SUSENAS Modul Konsumsi.
2. Menghitung *quantity* komoditi perumahan dari data Susenas Kor.
3. Menghitung harga rata-rata setiap komoditas. Harga yang tidak dapat diperoleh dari Susenas modul konsumsi diproksi dengan harga dari Indeks Harga Konsumen (IHK).
4. Menghitung relatif harga terhadap Jakarta Selatan.
5. Menghitung penyesuaian PPP (rupiah) atau rata-rata konsumsi riil dengan menggunakan formula :

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

Dimana :

$P_{(ij)}$: Harga Komoditas i di Kabupaten/kota j

$P_{(ik)}$: Harga komoditas i di Jakarta Selatan

M : Jumlah Komoditas

Perkembangan pembangunan manusia dapat dipengaruhi oleh faktor internal manusia itu sendiri, selain kesehatan pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh pendidikan sebagai penunjang manusia mencari objek membangun perekonomian agar dapat membangun kehidupan menjadi lebih

baik. Selain itu perlu adanya perkembangan dalam daya beli sehingga dapat memajukan perekonomian.

2.1.1.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia menyangkup tiga indikator yang telah di sepakati oleh UNDP, berupa:

1. Indeks Kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup pada saat lahir.
2. Indeks pendidikan, dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
3. Indeks daya beli, dilihat dengan nilai pengeluaran per kapita.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Kemandirian daerah merupakan salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah . Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001 dalam setiyawati dan Hamzah, 2007). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.2.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah(PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu(Abdul Halim, 2007) :

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pendapatan pajak daerah terdiri dari pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/ Kota.

a. Pajak Provinsi bersumber dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/ Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2. Retribusi Daerah, terdiri dari Retribusi Jasa Daerah, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.
 - a. Retribusi Jasa Umum bersumber dari:
 1. Retribusi Pelayanan Daerah
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 6. Retribusi Pelayanan Pasar
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 9. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta
 10. Retribusi Penyediaan dan Atau Penyedotan Kakus
 11. Retribusi Penelolaan Limbah Cair
 12. Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang
 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan
 14. Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi
 - b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Retribusi Pasar Grosir dan Atau Pertokoan
 3. Retribusi Tempat Pelelangan

4. Retribusi Terminal
 5. Retribusi Tempat Parkir Khusus
 6. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan /Villa
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 10. Retribusi Penyebrangan Air, dan
 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perijinan Tertentu, terdiri dari:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 3. Retribusi Izin Gangguan
 4. Retribusi Izin Trayek
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Halim dan Kushufi (2013), terdiri dari:
- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMN
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN

- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Menurut Halim (2007) lain-lain pendapatan asli daerah berasal dari hasil :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. jasa giro
- d. pendapatan bunga
- e. tuntutan ganti rugi
- f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah`

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitanya dengan meningkatnya barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat, maka semakin banyaknya barang dan jasa yang diproduksi berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusianya. Dengan modal manusia yang berkualitas maka kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik (Mirza, 2012).

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut Adam Smith penentuan tingkat kemakmuran adalah kemampuan manusia sendiri dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dimaksudkan bahwa sumber daya alam merupakan batas dari pertumbuhan dari perekonomian. Terlepas dari itu, ketersediaan modal dan tingkat teknologi yang digunakan manusia juga memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Kemudian menurut David Richardo keterbatasan jumlah tanah merupakan faktor terjadinya penurunan produk margin. Dengan kata lain apabila terjadi pertumbuhan penduduk (kenaikan tenaga kerja) akan mengakibatkan produksi menjadi menurun. Namun apabila terjadi kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup, dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan.

Pendapat beberapa ahli ekonomi klasik ditarik kesimpulan, yaitu (Suryana, 2000) :

1. Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung pada empat faktor, yaitu jumlah penduduk, stok modal, luas tanah dan tingkat teknologi yang dicapai.
2. Kenaikan upah akan menyebabkan kenaikan penduduk.
3. Tingkat keuntungan merupakan faktor penentu pembentukan modal. Bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai "*stationary state*" yaitu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali.

4. *The law of diminishing return* berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan penambahan produk yang akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan tingkat sewa tanah.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Menurut Solow sebagai perintis pertumbuhan neo-klasik, perkembangan ekonomi dihasilkan dari pembentukan harga, produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pasar.

Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi, dapat ditarik kesimpulan, yaitu (Suryana,2000) :

1. Faktor penting dalam perkembangan ekonomi adalah dengan adanya akumulasi kapital. Tingginya tingkat tabungan ditentukan oleh tingginya pendapatan dan bunga. Pada suatu tingkat tertentu, besarnya bunga juga dapat menentukan tingginya investasi.
2. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Proses perkembangan meliputi semua faktor yang terlibat tumbuh bersama.
3. Adanya aspek internasional dalam setiap perkembangan. Semakin luas pemasaran maka memungkinkan produksi yang besar, sehingga produktivitas semakin meningkat.
4. Perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berlangsung terus menerus (*gradual*).
5. Aliran neo-klasik merasa optimis dalam perkembangan ekonomi. Aliran sebelumnya mengatakan bahwa sumber daya alam menghambat

pertumbuhan ekonomi, sedangkan aliran ini meyakini bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan sumber daya alam.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Terdapat dua teori pertumbuhan ekonomi modern yang dianggap sebagai pelopor pertumbuhan ekonomi, yaitu teori pertumbuhan Rostow dan teori pertumbuhan Endogen. Teori Rostow berupa teori yang dicetuskan oleh W.W Rosrow mengartikan sebagai proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, berupa perubahan dalam dunia politik, sosial dan ekonomi. Terdapat lima tahap dalam proses pembangunan ekonomi dan setiap negara di dunia dapat digolongkan kedalam salah satunya, berupa (Lincoln, 1999) :

1. Masyarakat tradisional.
2. Persyaratan untuk lepas landas.
3. Lepas landas.
4. Menuju kematangan, dan
5. Tingkat konsumsi masyarakat tinggi.

Sedangkan teori pertumbuhan Endogen dicetus oleh Paul M Romer (1986) dan Robert Lucas (1988) yang merupakan awal dari pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari sistem ekonomi itu sendiri yang didorong dari sistem produksi. Kemajuan bidang teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan dalam pendapatan apabila

modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik tetapi juga menyangkut modal manusia.

2.1.4 Tenaga Kerja Terserap

Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam laporan Badan Pusat Statistik, penduduk yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun dikelompokkan sebagai penduduk usia kerja.

Tenaga kerja terserap merupakan model permintaan suatu unit usaha (instansi atau perusahaan) terhadap pasar tenaga kerja yang dapat dipengaruhi oleh peningkatan proses produksi. Besarnya permintaan terhadap tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal dari badan usaha, semakin sedikit teknologi (modern) yang digunakan maka kesempatan akan permintaan tenaga kerja akan semakin besar. Lapangan kerja terbesar dimiliki oleh sektor informal, dimana sektor ini sangat mudah dimasuki oleh pekerja karena tidak memerlukan modal khusus seperti keahlian, intelektual dan jenjang pendidikan yang tinggi dalam pengembangannya.

Sektor informal dan formal saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sektor informal merupakan penghasil dan penyedia akan barang dan jasa yang dibutuhkan sektor formal. Sedangkan sektor formal mampu memberikan kontribusi bagi sektor informal untuk mengembangkan usaha yang dalam rangka memperbesar *output*.

Permintaan akan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh instansi atau perusahaan tertentu.

Biasanya permintaan ini dipengaruhi oleh tingkat upah serta perubahan lain yang mempengaruhi permintaan hasil *output*. Besar kecilnya permintaan pengusaha akan tenaga kerja tergantung akan tingginya tingkat upah yang diinginkan pekerja. Selain itu rendahnya kualitas tenaga kerja menyebabkan instansi atau perusahaan memberikan kualifikasi terhadap tenaga kerja yang akan diterima.

Penawaran tenaga kerja merupakan banyaknya jumlah tenaga kerja yang disediakan pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah kerja dan jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dan penawaran tenaga kerja menurut jenis pekerjaan sangat menentukan besarnya upah yang diberikan oleh instansi atau perusahaan, penawaran tenaga kerja yang tidak besar dalam instansi atau perusahaan sedangkan permintaan tenaga kerja sangat besar menyebabkan upah cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi (Sadono, 2003).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel berikut ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian dilakukan terdahulu yang menjadikan landasan berpikir penulis, untuk memperluas informasi tentang ruang lingkup penelitian.

Penelitian terdahulu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, yang dijelaskan sebagai berikut :

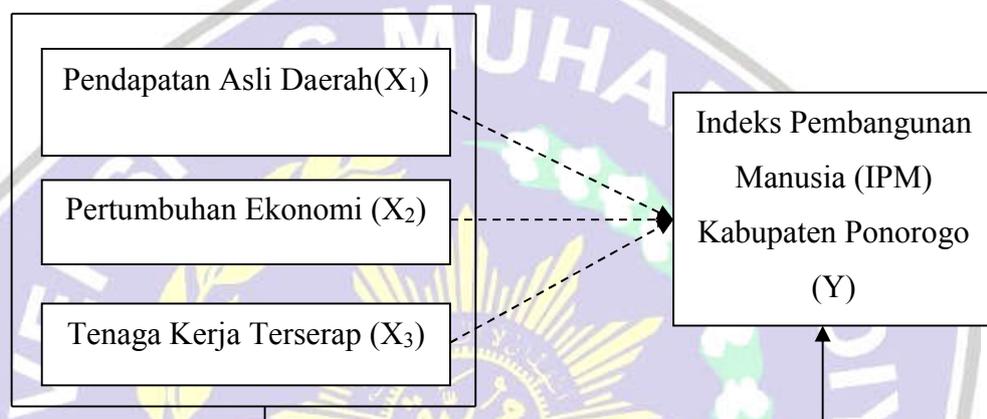
Tabel 2.1. Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah tahun 2007	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur	PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran.
2	Ridwan Maulana dan Prasetyo Ari Bowo tahun 2013	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia 2007-2011	pertumbuhan ekonomi dan pendidikan secara signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan Elastisitas peningkatan sebesar 0,012 dan 0,213. Sedangkan teknologi secara tidak signifikan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.
3	Deni Suliatio Mirza tahun 2012	Pengaruh Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap Indeks	Penurunan kemiskinan 1 persen akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,208, peningkatan

		Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009	pertumbuhan ekonomi 1 persen akan meningkatkan IPM sebesar 0,153, sedangkan kenaikan akan belanja modal per 1 persen akan meningkatkan 0,274 IPM.
4	Nur Baeti tahun 2013	Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011	Variable pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien negatif sebesar 1,96, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dengan nilai 0,14, variable pengeluaran pemerintah yang dalam hal ini adalah pengeluaran pemerintah untuk sector pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien positif sebesar 4,60 terhadap indeks pembangunan manusia.
5	Wawan ariyanto dan Riya dwi handaka tahun 2017	Analisis pengaruh belanja modal, indeks pembangunan manusia, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah tenaga kerja terserap, dan belanja modal kabupaten/kota secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisis pengaruh antara pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tenaga kerja terhadap indeks pembangunan manusia. Untuk studi kasus ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya mengenai kerangka pikir dikemukakan dalam rumus yang dapat dilihat dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Pertumbuhan Ekonomi

X₃ = Tenaga Kerja Terserap

--- = Berpengaruh secara parsial

— = Berpengaruh secara simultan

Pada Gambar 2.1 Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Untuk penelitian ini menggunakan analisis pengumpulan data secara *time series*.

2.4 Hipotesis

Hipotesis sering diartikan sebagai kesimpulan sementara terhadap masalah yang diajukan. Kebenaran suatu hipotesis tergantung pada hasil analisis lapangan. Suatu hipotesis dapat diterima kebenarannya apabila analisis data lapangan sesuai dengan teori, namun sebaliknya jika analisis data lapangan berbeda (bertolak belakang) dengan teori, maka hipotesis dapat ditolak (Santoso, 2015).

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Sumber pembiayaan daerah salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah, maka tidak salah apabila dalam pelaksanaan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah melakukan pembiayaan dengan pembebanan pada APBD. Pemerintah mengalokasikan dana yang digunakan dalam peningkatan layanan publik dengan bentuk alokasi belanja daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Sarkoro dan Zulfikar, 2016)

H_{o1} = Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

H_{a1} =Pendapatan asli daerahberpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Tumbuhnya perekonomian yang signifikan naik akan mendorong terciptanya infrastuktur yang dapat memicu perkembangan industri di berbagai bidang. Fasilitas publik semakin meningkat dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang mampu mendorong tingginya pembangunan manusia.

Dengan tingkat kesehatan dan pendidikan yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pembangunan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju (Baeti,2013).

H_{o2} = Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

H_{a2} = Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Pengaruh Tenaga Kerja Terserap terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kemampuan dan pengetahuan merupakan modal manusia dalam menunjukkan kualitas dari individu, hal ini berarti kualitas mampu menjadi nilai jual dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan penghasilan penduduk biasanya ditandai dengan meningkatnya produktivitas yang dihasilkan. Penduduk yang memiliki penghasilan tinggi akan cenderung memiliki

pengeluaran belanja yang tinggi pula, hal ini menyebabkan tumbuhnya perekonomian. Dengan kata lain semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Mirza, 2012)

H_{03} = Tenaga Kerja Terserap tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia

H_{a3} = Tenaga Kerja Terserap berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Terserap terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan dan belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan dan mensejahterakan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah terhadap masyarakat. Pemenuhan pelayanan dasar dalam bentuk pendidikan, kesehatan, fasilitas pelayanan sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan analisis standar belanja, tolak ukur kinerja, standar harga dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 /2004).

Penyerapan tenaga kerja akan berdampak kepada peningkatan produktivitas, hal ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia dapat dijelaskan melalui dua jalur, yaitu jalur kebijakan dan pengeluaran pemerintah dan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Besarnya pengeluaran tersebut mengindikasikan besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan manusia (Mirza, 2012).

H_{04} = Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja

Terserap tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

H_{a4} = Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja

Terserap berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

